

**FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA  
TINDAK KECURANGAN (*FRAUD*) DI LEMBAGA  
PEMERINTAHAN KABUPATEN KLATEN**

**FACTORS AFFECTING THE OCCURRENCE OF *FRAUD* IN  
KLATEN GOVERNMENT INSTITUTION**

**Mahfuzh Ardiyansyah Aditya Pratama**

*Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
mahfuzhardiyan@gmail.com*

**Abdullah Taman, SE., M.Si., Ak., CA.**

*Staf pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta*

**Abstrak:** Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) Di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi yang Tidak Sesuai, Kebutuhan yang Mendesak, Penegakan Peraturan, Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Rendahnya Tingkat Moral dan Integritas terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) Di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Klaten. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas di Kabupaten Klaten yaitu sebanyak 637 pegawai. Pemilihan sampel menggunakan Rumus *Slovin* dan didapatkan hasil 246 Sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompensasi yang Tidak Sesuai, Kebutuhan yang Mendesak, Penegakan Peraturan, Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Komitmen Organisasi tidak berpengaruh terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*), sedangkan untuk Rendahnya Tingkat Moral dan Integritas berpengaruh positif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*).

**Kata Kunci:** Kecurangan, Kompensasi yang Tidak Sesuai, Keefektifan Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Rendahnya Tingkat Moral dan Integritas.

**Abstract:** Factors Affecting The Occurrence Of *Fraud* In Klaten Government Institution. The aim of this study is to determine the influence of Incompatible Compensation, Urgent Needs, Rule Enforcement, The Effectiveness Of Internal Control, The Culture Of The Organization, The Commitment Of The Organization, and The Low Levels Of Morality and Integrity with The Occurrence Of *Fraud* in Klaten Government Institution. The population of this research is the employee of Klaten Government as many as 637 employees. The sample selection using *Slovin* Formula and obtained the result of 246 samples. The technique of collecting data using questioner with closed statement form. Data analysis using simple linier regression test. The results of this study showed that Incompatible Compensation, Urgent Needs, Rule Enforcement, The Effectiveness Of Internal Control, The Culture Of The Organization, and The Commitment Of The Organization does not affect The Occurrence Of *Fraud*, while for The Low Levels Of Morality and Integrity have a positive affect The Occurrence Of *Fraud*.

**Keywords:** *Fraud, Incompatible Compensation, Urgent Needs, Rule Enforcement, The Effectiveness Of Internal Control, The Culture Of The Organization, The Commitment Of The Organization, and The Low Levels Of Morality and Integrity.*

## PENDAHULUAN

Laporan keuangan dalam suatu usaha memiliki peran atau fungsi yang sangat penting karena data yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis baik pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi terutamanya kepada pihak yang berkepentingan agar mereka dapat mengetahui perkembangan perusahaan dari masa ke masa, Sukirno (2004:258-259). Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dalam mengelola perusahaan.

Penyajian laporan keuangan entitas pemerintahan berbeda dengan penyajian laporan keuangan yang disajikan dalam entitas swasta. Menurut PSAK 1 laporan keuangan entitas swasta meliputi laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat, sedangkan menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) laporan keuangan instansi pemerintah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Fungsi laporan keuangan dalam entitas pemerintah merupakan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Pemerintah sebagai pengembalian kepercayaan dari masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien, salah satunya adalah memastikan bahwa keuangan terkelola dengan baik. Namun pada pelaksanaannya banyak terjadi praktik kecurangan atau *fraud* yang secara langsung dapat merugikan negara dan secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

*Black's Law Dictionary* dalam Kurniawati (2012:12) mendefinisikan kecurangan sebagai semua macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang dapat diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang

lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat licik atau tersembunyi, dan setiap cara yang tidak wajar yang menyebabkan orang lain tertipu

*The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu, Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*), Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*), dan Korupsi (*Corruption*).

*Asset misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena dapat diukur/dihitung (*defined value*) dengan mudah.

*Fraudulent statement* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

Korupsi (*Corruption*) merupakan penyalahgunaan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, korupsi merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain yang biasanya sudah direncanakan oleh para pelakunya. Kecurangan atau *fraud* paling sering ditemui di sektor pemerintahan di negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah.

Kasus kecurangan yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Korupsi merupakan suatu budaya dan *tren* yang menjadi persoalan yang berkepanjangan di Indonesia, bahkan Indonesia memiliki peringkat yang tinggi di antara negara-negara lain dalam hal kasus korupsi. Indonesia menempati peringkat ke-90 dari 172 negara di dunia survei ini dilakukan oleh Lembaga *Transparency International* (TI) tahun 2016. Selain itu tingkat kasus korupsi dinilai terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Survey Nasional Anti Korupsi Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa kasus korupsi mengalami peningkatan sebesar 70% tahun 2017.

Tindak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat sering terjadi pada lembaga-lembaga atau entitas pemerintahan negara. Survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) pada tahun 2017 menyatakan bahwa peringkat pertama lembaga negara yang paling korup adalah DPR, di ikuti oleh lembaga Birokasi dan DPRD di peringkat kedua dan ketiga. Berdasarkan data di atas, birokrasi sebagai salah satu lembaga pemerintahan dan pelayanan publik menempati peringkat kedua dari delapan lembaga pemerintah yang disurvei.

Pada dasarnya di negara sedang berkembang birokrasi memegang peranan penting karena sebagai pelaksana dari keputusan dan program-program yang dicanangkan pemerintah. Kenyataan yang terjadi di negara sedang berkembang justru sebaliknya, keadaan birokrasi di Negara berkembang semakin memprihatinkan karena sebagai salah satu lumbung korupsi. Salah satu negara berkembang yang menjadi lumbung korupsi adalah negara Indonesia.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di birokrasi adalah kasus suap jabatan di Kabupaten Klaten. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten SR di Klaten, Jawa Tengah. Ada total 8 orang yang ditangkap dalam OTT ini. (Kompas.com: Sabtu 31 Desember 2016).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan atau *fraud*. Teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan kecurangan adalah *Fraud Triangle Theory* yang di kemukakakn oleh Donald R. Cressey (1953). *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan), dan *rationalization* (rasionalisasi).

Tekanan atau *pressure* merupakan faktor yang berasal dari kondisi individu yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan dari dalam diri seseorang tersebut dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat bekerja ataupun dari lingkungan luar tempat bekerja. Salah satu faktor lingkungan kerja yang dapat menyebabkan tekanan pada seorang pegawai adalah mengenai kompensasi yang diterima.

Kompensasi adalah suatu *outcome* atau *reward* yang diperoleh seseorang dari kegiatan bekerja,

Zulkarnain (2013:31). Dengan adanya kompensasi para pegawai dapat memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang mendapatkan kompensasi yang rendah atau kurang sesuai akan merasa tertekan karena akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian para pegawai akan mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan kecurangan.

Selain itu faktor dari luar tempat kerja yang dapat menekan seseorang untuk melakukan kecurangan adalah kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh setiap manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kebutuhan yang tak terduga adalah kebutuhan yang muncul secara takterduga dan biasanya bersifat mendesak, seperti kebutuhan akan operasi ketika mengalami kecelakaan.

Kebutuhan yang mendesak akan menyebabkan seseorang akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhannya meskipun harus dengan melakukan kecurangan sekalipun, Isgiyata (2018:35).

Kesempatan atau *opportunity* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan. Kondisi ini biasanya disebabkan karena *internal control* suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan kekuasaan, Zulkarnain (2013:12). Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan atau instansi pemerintah dengan peningkatan keefektifan sistem pengendalian internal dan memperkuat penegakan peraturan.

Pengendalian internal akan berpengaruh terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan dalam suatu instansi pemerintah. Semakin baik pengendalian internal dalam suatu instansi, maka akan semakin rendah pula tingkat kecurangan dalam instansi pemerintah, Wilopo (2008).

Selain itu penegakan peraturan merupakan bentuk tindakan nyata oleh karyawan atau pegawai kepada peraturan yang berlaku yaitu dengan mentaati peraturan yang ada di suatu perusahaan atau instansi. Semakin kuat peraturan yang ditegakan dalam suatu instansi maka akan semakin mempersempit kesempatan bagi pegawai atau karyawan untuk

melakukan kecurangan, Nahjaningrum (2013:61).

Rasionalisasi atau *rationalization* adalah komponen penting dalam banyak kecurangan, rasionalisasi menyebabkan pelaku kecurangan mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Budaya organisasi dan komitmen kepada organisasi merupakan faktor yang diduga dijadikan alasan pembenaran.

Menurut Robbins (2006:4) budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang lain.

Jika suatu budaya dalam instansi menganggap suatu tindakan kecurangan adalah suatu hal yang wajar dan biasa terjadi, maka setiap pegawai dalam instansi tersebut akan cenderung melakukan kecurangan karena pegawai tersebut akan merasionasi tindakan tersebut sebagai tindakan yang biasa dan wajar terjadi. Begitu pula sebaliknya, budaya organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan kecurangan karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut

memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi) Arifin dalam Zulkarnain (2013:53).

Komitmen pegawai yang tinggi terhadap organisasi membuat pegawai cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang bisa saja menghambat tercapainya tujuan organisasi. Sebaliknya, jika pegawai memiliki komitmen yang rendah terhadap organisasinya, maka pegawai cenderung akan melakukan hal-hal yang menghambat tercapainya tujuan organisasi demi tujuan pribadinya sendiri. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah kecurangan.

Faktor utama penyebab kasus korupsi di negara sedang berkembang adalah faktor dari dalam individu itu sendiri yaitu rendahnya tingkat moral atau integritas (Yuliani, 2011:4).

Rendahnya tingkat moral dan integritas akan menyebabkan perilaku kecurangan yang dapat dilakukan oleh pegawai atau karyawan, seperti perilaku penyalahgunaan kedudukan, dan perilaku penyalahgunaan sumberdaya organisasi. Begitu pula sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat moral dan integritas seorang pegawai maka semakin kecil kecenderungan seorang

pegawai untuk melakukan tindak kecurangan

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sugiyono (2011: 16) menyatakan bahwa “metode kuantitatif dapat dibagi menjadi dua yaitu metode eksperimen dan metode survei”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada 15 Dinas di Kabupaten Klaten. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan akan dilaksanakan pada bulan April 2018.

### **Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di 15 Dinas di Kabupaten Klaten dengan jumlah pegawai 677. Akan tetapi dari jumlah 15 dinas yang terdapat di Kabupaten Klaten, hanya 14 dinas yang menyetujui ijin penelitian dan ada 1 dinas yang tidak menyetujui ijin penelitian, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga total

populasi berubah dari 677 pegawai menjadi 637 pegawai.

### **Prosedur**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya Sugiyono (2011: 142).

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang langsung di ambil dari sumber asli. Kuisisioner yang digunakan merupakan kuisisioner yang bersifat tertutup.

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil menggunakan Rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang akan diambil

N = Jumlah keseluruhan populasi

e = Batas toleransi kesalahan  
(*error tolerance*)

Berdasarkan total populasi yaitu sebanyak 637 pegawai di peroleh sampel

sebesar 246. Peneliti menyebarkan 270 kuisioner dan kuisioner yang kembali sebanyak 250 kuisioner.

### Teknik Analisis Data

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Teknik Analisis regresi linear sederhana dengan melakukan uji t. Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh satu variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis sederhana dengan melakukan uji t. Uji t digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya.

Jika nilai t hitung bernilai positif dan secara mutlak  $> t$  tabel, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel independen (X) berpengaruh secara positif terhadap variabel dependen (Y), Jika nilai t hitung bernilai negatif dan secara mutlak  $> t$  tabel, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel independen (X) berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen (Y), dan Jika nilai t hitung bernilai positif atau negatif dan secara mutlak  $< t$  tabel,

maka dapat di ambil kesimpulan bahwa variabel independen (X) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Berikut adalah hasil dari Analisis Regresi sederhana dengan uji t menggunakan alat bantu SPSS :

Tabel 1. Uji Regresi Linier Sederhana dengan uji t

No	Variabel	t hitung	t tabel	Kesimpulan
1	Kompensasi yang Tidak Sesuai	0,482	1,650	Tidak Berpengaruh
2	Kebutuhan yang Mendesak	-0,698	1,650	Tidak Berpengaruh
3	Penegakan Peraturan	1,148	1,650	Tidak Berpengaruh
4	Keefektivan Pengendalian Internal	0,172	1,650	Tidak Berpengaruh
5	Budaya Organisasi	0,730	1,650	Tidak Berpengaruh
6	Komitmen Organisasi	-0,907	1,650	Tidak Berpengaruh
7	Rendahnya Tingkat Moral dan Integritas	2,199	1,650	Berpengaruh Positif

### H1 : Kompensasi yang Tidak Sesuai berpengaruh Positif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Klaten.

Berdasarkan data hasil uji regresi sederhana dengan uji t, diketahui bahwa variabel Kompensasi Yang Tidak Sesuai memperoleh nilai t hitung sebesar  $|0,462| < t$  tabel yaitu 1,650. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Kompensasi yang Tidak Sesuai (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang kedua dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Maya Adinda (2015) dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. Persamaan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian dari Yuanita Maya Adinda (2015) bisa disebabkan oleh kesamaan obyek penelitian yaitu di Kabupaten Klaten. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta). Hasil penelitian dari Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) mengungkapkan bahwa Kompensasi yang tidak Sesuai berpengaruh negatif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan. Perbedaan hasil penelitian ini bisa di sebabkan oleh Obyek penelitian yang, jumlah populasi dan sampel yang berbeda.

**H2 : Kebutuhan yang Mendesak berpengaruh Positif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Klaten.**

Berdasarkan data hasil uji regresi sederhana dengan uji t, di peroleh hasil bahwa nilai nilai t hitung sebesar  $|-0,698|$

$< t$  tabel yaitu 1,650. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Kebutuhan yang Mendesak (X2) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang kedua dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Jaka Isgiyata, Indayani, dan Eko Budiyoni (2017) dengan judul Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap *Fraud* Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. Dimana hasil dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kebutuhan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud*. Perbedaan hasil dari penelitian ini dengan hasil dari penelitian dari Jaka Isgiyata, Indayani, dan Eko Budiyoni (2017) dikarenakan perbedaan obyek penelitian, jumlah populasi dan sampel, juga bisa dikarenakan alat uji statistik yang digunakan berbeda.

**H3 : Penegakan Peraturan berpengaruh Negatif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Klaten**

Berdasarkan data hasil uji regresi sederhana dengan uji t, di peroleh hasil

bahwa nilai nilai t hitung sebesar  $|1,148| < t$  tabel yaitu 1,650. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Penegakan Peraturan (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang ketiga dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) dengan judul Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta). Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian dari Anik Fatun Najahningrum (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Hasil uji hipotesis dari penelitian Anik Fatun Najahningrum (2013) mengungkapkan bahwa Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan.

Perbedaan hasil dari penelitian ini dengan hasil dari penelitian Anik Fatun Najahningrum (2013) bisa dikarenakan perbedaan obyek penelitian, jumlah populasi dan sampel, juga bisa dikarenakan alat uji statistik yang digunakan berbeda.

#### **H4 : Keefektivan Pengendalian Internal berpengaruh Negatif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Klaten**

Berdasarkan data hasil uji regresi sederhana dengan uji t, di peroleh hasil bahwa nilai nilai t hitung sebesar  $|0,172| < t$  tabel yaitu 1,650. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Penegakan Peraturan (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang keempat dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Yuanita Maya Adinda (2015) dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten, Penelitian dari Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) dengan judul Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta), dan Anik Fatun Najahningrum (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Perbedaan hasil dari penelitian ini dengan hasil dari

penelitian lainnya bisa dikarenakan perbedaan obyek penelitian, jumlah populasi dan sampel, juga bisa dikarenakan alat uji statistik yang digunakan berbeda.

**H5 : Budaya Organisasi berpengaruh Negatif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Klaten**

Berdasarkan data hasil uji regresi sederhana dengan uji t, di peroleh hasil bahwa nilai t hitung sebesar  $|0,730| < t$  tabel yaitu 1,650. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Budaya Organisasi (X5) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang kelima dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian dari Rifqi Mirza Zulkarnain (2013) dengan judul Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta) dan Anik Fatun Najahningrum (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Yuanita Maya

Adinda (2015) dengan judul Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. Perbedaan hasil dari penelitian ini dengan hasil dari penelitian Yuanita Maya Adinda (2015) dikarenakan perbedaan jumlah populasi dan sampel yang digunakan, selain itu alat uji statistik yang digunakan juga berbeda.

**H6 : Komitmen Organisasi berpengaruh Negatif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Klaten**

Berdasarkan data hasil uji regresi sederhana dengan uji t, di peroleh hasil bahwa nilai nilai t hitung sebesar  $|-0,907| < t$  tabel yaitu 1,650. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Komitmen Organisasi (X6) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang keenam dinyatakan ditolak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Ray Rachmanta dan Sukardi Ihsan (2014) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor

Pendidikan di Kota Semarang dan penelitian dari Anik Fatun Najahningrum (2013) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Perbedaan hasil dari penelitian ini bisa dikarenakan perbedaan obyek penelitian, jumlah populasi dan sampel, juga bisa dikarenakan alat uji statistik yang digunakan berbeda.

**H7 : Rendahnya Tingkat Moral dan Integritas berpengaruh Positif terhadap Terjadinya Tindak Kecurangan pada lembaga pemerintahan Kabupaten Klaten**

Berdasarkan data hasil uji regresi sederhana dengan uji t, di peroleh hasil bahwa nilai nilai t hitung sebesar  $|2,199| > t$  tabel yaitu 1,650. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Rendahnya Tingkat Moral dan Integritas ( $X_7$ ) berpengaruh positif terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (Y). Dengan demikian hipotesis yang ketujuh dinyatakan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sri Yuliani (2006) yang berjudul Korupsi Birokrasi :Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya.

**SIMPULAN DAN SARAN**  
**Simpulan**

- a. Variabel Kompensasi yang Tidak Sesuai ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) (Y). Pernyataan ini dibuktikan pada tabel hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa nilai t hitung sebesar  $|0,462| < t$  tabel yaitu 1,650.
- b. Variabel Kebutuhan Yang Mendesak ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) (Y). Pernyataan ini di buktikan pada tabel hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa nilai nilai t hitung sebesar  $|-0,698| < t$  tabel yaitu 1,650.
- c. Variabel Penegakan Peraturan ( $X_3$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) (Y). Pernyataan ini dibuktikan pada tabel hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa nilai nilai t hitung sebesar  $|1,148| < t$  tabel yaitu 1,650.
- d. Variabel Keefktivan Pengendalian Internal ( $X_4$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) (Y). Pernyataan ini dibuktikan pada

tabel hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa nilai  $t$  hitung sebesar  $|0,172| < t$  tabel yaitu 1,650.

- e. Variabel Budaya Organisasi ( $X_5$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) ( $Y$ ). Pernyataan ini dibuktikan pada tabel hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa nilai  $t$  hitung sebesar  $|0,730| < t$  tabel yaitu 1,650.
- f. Variabel Komitmen Organisasi ( $X_6$ ) tidak berpengaruh terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) ( $Y$ ). Pernyataan ini dibuktikan pada tabel hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa nilai  $t$  hitung sebesar  $|-0,907| < t$  tabel yaitu 1,650.
- g. variabel Rendahnya Moral dan Integritas ( $X_7$ ) berpengaruh positif terhadap variabel Terjadinya Tindak Kecurangan (*Fraud*) ( $Y$ ). Pernyataan ini dibuktikan pada tabel hasil uji regresi linear sederhana diketahui bahwa nilai  $t$  hitung sebesar  $|2,199| > t$  tabel yaitu 1,650.

#### Saran

- a. Diharapkan untuk Pemerintah

Kabupaten Klaten lebih meningkatkan Integritas dan moral bagi para calon pegawai pemerintahan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan baik secara formal melalui lembaga pendidikan atau dengan cara informal yaitu melalui penyuluhan dan pembinaan.

- b. Mengenai peraturan dan pengendalian internal diharapkan untuk selalu ditegakkan agar tidak memberikan sedikitpun peluang bagi para pelaku untuk melakukan kecurangan.
- c. Diharapkan untuk selalu menciptakan dan menjaga budaya kerja yang bersih agar para pegawai terdorong untuk melakukan pekerjaannya secara bersih dan terbebas dari tindakan kecurangan.
- d. Diharapkan untuk meningkatkan komitmen terhadap instansi. Memahami bahwa pegawai bekerja bukan hanya untuk kepentingan pribadinya tetapi juga untuk kepentingan publik atau masyarakat.
- e. Diharapkan untuk selalu melakukan transparansi anggaran kepada seluruh pihak agar dapat

meningkatkan kepercayaan dari masyarakat mengenai pengelolaan dana di pemerintahan Kabupaten Klaten.

## DAFTAR PUSTAKA

Adinda, Yunita Maya. (2015). Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Black's Law Dictionary. (1990). 6th Edition. St. Paul, MN: West Publishing Co.

Isgiyata, Jaka dkk. (2017). Studi Tentang Teori Gone dan Pengaruhnya Terhadap Fraud Dengan Idealisme Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi: Studi Pada Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB)*, Vol. 5(1), 2018, pp 31-42

Kompas. Kronologi Penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini Oleh KPK. Diakses pada: 1 November 2017 dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/31/19253791/kronolo>

[gi.penangkapan.bupati.klaten.srihartini.oleh.kpk](http://gi.penangkapan.bupati.klaten.srihartini.oleh.kpk)

Liputan 6. (2017). Ini Peringkat Korupsi Indonesia dari 172 Negara di Dunia. Diakses pada 1 November 2017 dari: <http://citizen6.liputan6.com/read/3012560/ini-peringkat-korupsi-di-indonesia-dari-172-negara-di-dunia.04.juli.2017>.

Najahningrum, Anik Fatun. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sukirno Sadono, dkk. (2004). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Tribunnews. (2017). Survei: 70 Persen Bilang Korupsi di Indonesia Melonjak. Diakses 3 November 2017 dari: <http://www.tribunnews.com/nasi>

onal/2017/07/20/survei-70-  
persen-bilang-korupsi-di-  
indonesia-melonjak.

Wilopo. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Simposium Nasional Akuntansi IX.

Yuliani, Sri. (2011). *Korupsi Birokrasi: Faktor Penyebab Dan Penanggulangannya*. Diakses pada 30 Oktober 2017 dari: <http://sriyuliani.staff.fisip.uns.ac.id/wpcontent/uploads/sites/10/2011/06/KORUPSI-blog.pdf>.

Zulkarnain, Rizqi Mirza. (2013), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta)*. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.